

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS
DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
SULAWESI SELATAN**

MUCHRIANA MUCHRAN^{1,2}
ENDANG WINARSIH
HELDAWATI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

ABSTRACT

This study aims to determine how the budget realization in assessing the efficiency and effectiveness of performance in the Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. The type of research used in this research is descriptive quantitative research. The population in this study is the Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, while the sample used is the budget realization from 2014-2018 in the Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. The sampling method in this study used purposive sampling method. The data used in this study are primary data collected through observational interviews and direct financial reports. Data analysis used secondary data analysis. The results of this study indicate that the budget realization analysis of the effectiveness and efficiency of the performance of the Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan is good.

Keywords: Budget, Effectiveness, and Efficiency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran dalam menilai efisiensi dan efektivitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, sedangkan sampel yang digunakan realisasi anggaran dari tahun 2014-2018 yang ada di Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara observasi dan laporan keuangan secara langsung. Analisis data menggunakan analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis realisasi anggaran efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dikatakan baik.

Kata-kata Kunci: Anggaran, Efektivitas, dan Efisien.

Article Info:

Received 28 April 2021 | Revised 15 June 2021 | Accepted 31 July 2021

¹ E-mail: muchranmuchriana@gmail.com

² Correspondence Author

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya era baru dalam pelaksana pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi Pemerintahan maupun dalam hubungan pusat dan daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Masyarakat menuntut pemerintah yang bersih atau yang dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Anggaran yang dikelola oleh organisasi sektor publik harus menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang menjadi indikator kinerja keuangan suatu entitas sektor publik. Pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dalam memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2016; 297).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus memaksimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan untuk optimalisasi anggaran. Dalam hal ini semua aspek dari struktur aparatur daerah harus disusun dan berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, dalam era otonomi daerah sekarang ini, beberapa wilayah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya kreasi baru sejalan dengan kewenangan tersebut. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan di Daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam sistem pemerintahan. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan

informasi baik yang bersifat terkendali maupun tidak terkendali, untuk dijadikan bahan prediksi. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan prediksi dalam proses perencanaan anggaran.

Tingkat keberhasilan penganggaran ini biasanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja apabila terjadi defisit atau surplus anggaran berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dengan adanya barometer keberhasilan anggaran instansi seperti itu maka terbentuklah pemikiran bahwa penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan harus (100%) agar tidak terjadi surplus atau defisit tanpa memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Memberikan tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada instansi yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai apakah kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan instansi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah realisasi anggaran dalam menilai efisiensi dan efektivitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan?

2. LANDASAN TEORI

Anggaran Sektor Publik

Penelitian Mardiasmo (2009:62) menjelaskan anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu lembaga atau instansi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap kegiatan dan aktivitas dalam satuan moneter. Pada sektor publik, anggaran harus dipublikasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana penerimaan dan pengeluaran daerah yang meliputi rencana pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang disetujui oleh

DPRD dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

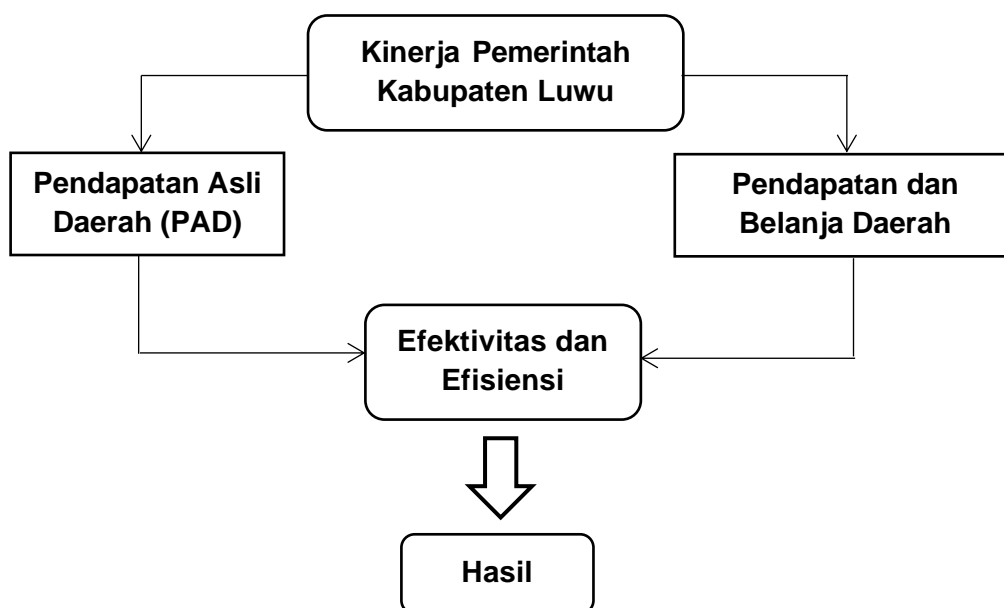
Laporan Realisasi Anggaran

Penelitian Rugayah et al., (2017) menjelaskan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system*.

Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep

3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama lima tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018, yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan berupa laporan tahunan yang bersangkutan. Dalam hal ini dipaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Kabupaten Luwu, sedangkan secara kuantitatif dihitung perkembangan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu. Unit analisis pada penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu tahun 2014 sampai dengan tahun anggaran 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja operasi, Belanja modal, Belanja tak terduga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dan sebagai institusi melalui data seri waktu (*time series*) pengumpulan data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu

Teknik Analisis Data Analisis Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*). Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk Yuniarti (2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2013:141).

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat efektif : >100%
2. Efektif : 100%
3. Cukup efektif : 90%-99%
4. Kurang efektif : 75%-89%
5. Tidak efektif : <75%

Sumber: Mahmudi (2013:141).

Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Output* adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2013:164).

1. Tidak efisien : >100%
2. Kurang efisien : 100%
3. Cukup efisien : 90%-99%
4. Efisien : 75%-89%
5. Sangat Efisien : <75%

Sumber: Mahmudi (2013:141)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan memberikan keuntungan yang sangat baik bagi kinerja anggaran pemerintah daerah. Di mana anggaran belanja APD dan realisasi anggaran sangat memperlihatkan hasil yang maksimal di lihat dari hasil uji efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu.

Tabel 1. Data Persentase Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun	Efektivitas (%)	Keterangan	Kenaikan/ Penurunan (%)	Efisiensi (%)	Keterangan	Kenaikan/ Penurunan (%)
2014	107.33	Sangat Efektif	0	97.16	Cukup Efisien	0
2015	106.54	Sangat Efektif	-0.79	97.88	Cukup Efisien	+0.64
2016	95.95	Sangat Efektif	-10.59	97.12	Cukup Efisien	-0.68
2017	102.22	Sangat Efektif	+6.27	98.23	Cukup Efisien	+1.11
2018	97.19	Sangat Efektif	-5.03	98.23	Cukup Efisien	+1.1

Dari hasil uji analisis efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu memperoleh hasil yaitu pada tahun 2014-2018 memiliki tingkat efektivitas di atas 100%. hasil ini menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran daerah Kabupaten Luwu sangat efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran, selama tahun 2014-2018 anggaran PAD semakin meningkat, dengan nilai efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan persentase 107.33% yang mengalami penurunan sebesar 106.54% di tahun 2015. Begitupun tahun sesudahnya, nilai efektivitas terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu dengan persentase 95.95% dengan penurunan 10.59%. dibanding tahun 2017 dengan persentase sebesar 102,22% dengan kenaikan 6.27% dari tahun sebelumnya. meskipun mengalami grafik yang naik turun, nilai persentase efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu selama 5 tahun periode anggaran sangat efektif, yaitu dengan hasil persentase keseluruhan nilai efektivitas yang menunjukkan nilai di atas 100%.

Dari hasil uji analisis efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu memperoleh hasil yaitu berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2014 memiliki tingkat efisiensi sebesar 97.16%, kemudian pada tahun 2015 Kabupaten Luwu mengalami peningkatan tingkat efisiensi yaitu sebesar 97.88% meningkat 0.64% dari tahun 2014, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi adanya kecenderungan pemborosan anggaran. untuk tahun 2014- 2018 Kabupaten Luwu mengalami kenaikan tingkat efisiensi hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu dalam mengelola anggaran belanja daerah dari tahun 2014-2018 memperbaiki kinerjanya.

Dari hasil analisis yang di lakukan bahwa efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan darimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan antara *output* dengan tujuan. Adapun faktor penentuan efektif dan efisien :(1) faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja,

kemampuan kerja, maupun daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana, (2) faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan, baik struktur maupun fungsional, (3) faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, (4) dukungan kepala aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

Dalam Penelitian Nordiawan dan Hertianti (2010) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktifitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nama Peneliti Cindy (2013), dengan judul analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil kedepannya pemerintah daerah atau terlebih khusus Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara agar dapat mempertahankan tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran dengan meningkatkan terus pengawasan, pelayanan, dan koordinasi pemerintah agar supaya realisasi pendapatan asli daerah lebih maksimal. dan penelitian ini bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiky (2015) meneliti analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2011-2015, menemukan bahwa anggaran belanja daerah masih mengalami defisit, karena kegiatan perekonomian daerah kurang berkembang, setelah infrastruktur terbangun mulai tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri berhasil memanfaatkan anggaran belanja menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah telah berjalan lancar didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2011-2015 Kabupaten Wonogiri bisa dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

- a. Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu selama tahun anggaran 2014-2018 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%.
- b. Perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu selama tahun anggaran 2014-2018 dapat dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariel Sharon Sumenge.2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol. 1 No 3 September 2013. Hal. 74-81. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Bastian, Indra. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Haruman 2010. "*Penyusunan Anggaran*". Edisi Pertama, Salemba Empat : Jakarta. Mahmudi.*Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN:Yogyakarta, 2011. Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Haruman dan Sri Rahayu. 2010. "*Penyusunan Anggaran*". Edisi Pertama, Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat : Jakarta.
- Kiky Muryanti.2017. Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011 -2015. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Rahardjo, Adisasmita (2011), *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Roland Gerald Tooy, David Paul, Elia Saerang, Lidia Mawikere.2016. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Perubahan Atas 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Rukayah, (2017). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*. Jurnal Akuntansi 4(2).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.

...ANALISIS REALISASI ANGGARAN...
[M. MUCHRAN, E. WINARSIH, HELDAWATI]

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 *tentang Pemerintahan Kelurahan* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. Jakarta.
https://www.Pemerintah.makassarkota.go.id/pocontent/uploads/lakip_Pemerintah_2018_30072019.pdf